



Judul : Pimpinan setuju RUU TPKS dibahas saat DPR reses
Tanggal : Sabtu, 12 Februari 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Pimpinan Setujui RUU TPKS Dibahas Saat DPR Reses

■ NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menyebut, pimpinan DPR telah memberikan izin agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat dibahas saat masa reses. Hal tersebut sudah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Kami sudah bersurat pada Bamus yang sebelumnya, dua pekan lalu untuk proses pembahasan RUU TPKS dibahas di masa reses, diberikan izin di masa reses. Dan pimpinan mengiyakan," ujar Willy kepada wartawan, Jumat (11/2).

Namun, DPR belum bisa segera melakukan pembahasan RUU TPKS. Pasalnya, pihaknya belum menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dan surat presiden (surpres) dari pemerintah. "Begitu (DIM dan surpres dari pemerintah) masuk kita raker," ujar Willy.

DPR sendiri akan menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang pada 17 Februari mendatang. Ia berharap dalam waktu dekat pemerintah segera mengirim surpres dan menggelar rapat kerja.

"DIM sama surpres ditandatangani oleh empat menteri. Kalau bisa dikirim hari ini *kan* bagus, kalau tidak ya hari Senin. Kemarin koordinasi dengan gugus tugas hari ini empat menteri akan mengesahkan DIM," ujar Willy.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani mendukung percepatan pembahasan rancangan RUU TPKS. Ia pun mendukung apabila RUU itu dibahas saat DPR menjalani masa reses.

"Kami akan usulkan itu untuk segera dibahas sehingga masa reses ini kita bisa bersidang untuk membahas itu," ujar Muzani, Kamis (10/2).

Pembahasan RUU TPKS yang diusulkan pada masa reses tersebut tidak menjadi permasalahan. Apalagi, bila memang bertujuan untuk mempercepat pembahasan RUU yang diharap-

kan banyak pihak segera disahkan menjadi undang-undang.

"Dalam arti makin cepat makin bagus karena problem yang dihadapi sekarang itu semakin kompleks. Dan makin kompleks karena kemajuan sosial, teknologi, dan seterusnya sehingga kepastian untuk segera mencegah kekerasan seksual harus segera dipastikan," ujar Muzani.

"Karena itu upaya untuk segera menghadirkan undang-undang yang bisa menangani kekerasan seksual itu kami mendukung. Kalau perlu bila masa reses ini ya kita bersidang untuk itu," ujarnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan, DIM pemerintah atas RUU TPKS telah selesai. "DIM pemerintah atas naskah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah kami terima akhir bulan lalu dari DPR, sudah rampung," kata Puspayoga, Kamis.

■ antara ed: andri saubani